UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

Bab	Isi	Hal
	PERSETUJUAN	ii
	PERNYATAAN	iii
	KATA PENGANTAR	iv
	DAFTAR ISI	viii
	DAFTAR TABEL	xi
	DAFTAR GAMBAR	xii
	DAFTAR LAMPIRAN	xiv
	DAFTAR SINGKATAN	xv
	INTISARI	xix
	ABSTRACT	xx
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Permasalahan Penelitian	9
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4	Sistematika Penulisan	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	18
2.1	Tinjauan Pustaka	18
	2.1.1. *Review* Penelitian Sebelumnya	18
	2.1.2. Peta *Gap* Penelitian	24
2.2	Landasan Teori	27
	2.2.1. Implementasi Kebijakan	27
	2.2.2. Pengertian Kerjasama Pertahanan	33
	2.2.3. Manfaat Kerjasama Pertahanan	37
	2.2.4. Kebijakan Kerja Sama Pertahanan	45
	2.2.5. Kesiagaan Militer	51
	2.2.6. Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Kebijakan Kerja Sama Pertahanan dan Kesiagaan Militer	58
2.3	Kerangka Pikir	61
2.4	Keaslian Penelitian	64
BAB III	METODE PENELITIAN	69
3.1	Lokasi penelitian	69
3.2	Pengambilan Sampel	70
	3.2.1. Populasi dan Sampel	70
	3.2.2. Pengambilan Sampel	71
	3.2.3. Penentuan Sampel	72

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.3	Variabel Penelitian	74
	3.3.1. Variabel dan Data	75
	3.3.2. Definisi Operasional	76
	3.3.3. Teknik Pengumpulan Data	79
3.4	Analisis Data	80
	3.1.1. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif	80
	3.4.2. Analisis Implikasi dan Peran Variabel	83
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERSETUJUAN KPIT 2007	86
4.1	Kebijakan Kerjasama Pertahanan Indonesia	86
	4.1.1. Kebijakan Negara	86
	4.1.2. Kebijakan Pemerintah Indonesia	89
	4.1.3. Kebijakan Kerja sama dengan Negara Sahabat	92
4.2	Dinamika yang Mendasari Persetujuan KPIT 2007	95
	4.2.1. Perkembangan di Laut Tiongkok Selatan	95
	4.2.2. Kepentingan Indonesia dan Tiongkok	106
	4.2.3. Keputusan Penandatanganan Persetujuan KPIT Tahun 2007	120
BAB V	IMPLEMENTASI KPIT TAHUN 2007	137
5.1	Tindakan Regulatif	137
	5.1.1. Aturan Pelaksanaan	137
	5.1.2. Sosialisasi Aturan Pelaksanaan	141
	5.1.3. Pengendalian Aturan	146
5.2	Tindakan Alokatif	149
	5.2.1 Penunjukan Pelaksana	149
	5.2.2 Penyusunan Program dan Anggaran	152
5.3	Kegiatan Pertukaran Informasi Kelembagaan	155
5.4	Kegiatan Kerja sama Bidang Pendidikan dan Pelatihan	169
5.5	Kegiatan Pertukaran Data Ilmiah dan Teknologi	176
5.6	Kegiatan Kerja Sama Bidang Industri Pertahanan	181
5.7	Kegiatan Latihan Militer Bersama	189
BAB VI	IMPLIKASI KPIT TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA	199
6.1	Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu dan Satuan	199
	6.1.1. Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu	199
	6.1.2. Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Satuan	221
6.2	Implikasai KPIT Terhadap Kesiagaan Militer	238
	6.2.1. Peningkatan Kemampuan Penguasaan Teknologi Militer	238
	6.2.2. Peningkatan Kemampuan Strategi Kepemimpinan	245

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Militer
6.2.3. Peningkatan Kapasitas Personel Militer 250

BAB VII PERAN KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP IMPLEMENTASI KPIT DAN KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA 259
7.1 Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Implementasi KPIT 259
7.1.1. Peran Elite Politik Terhadap Implementasi KPIT 259
7.1.2. Peran Pimpinan Satuan Terhadap Implementasi KPIT 263
7.1.3. Peran Anggaran Terhadap Implementasi KPIT 270
7.1.4. Peran Partisipan Terhadap Implementasi KPIT 277
7.2 Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Kesiagaan Militer 284
7.2.1. Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Penguasaan Teknologi Militer 284
7.2.2. Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Strategi Kepemimpinan Militer 294
7.2.3. Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Kapasitas Personel Militer 300
BAB VIII PENUTUP 313
8.1 Kesimpulan 313
8.2 Rekomendasi 317
DAFTAR PUSTAKA 321

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS
KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

Nomor	Deskripsi	Hal
Tabel 1.1	Perbandingan Beban Tugas Prajurit dalam pengamanan wilayah dan melindungi warga negara.	8
Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian Ini dengan Penelitian Sebelumnya	65
Tabel 3.1	Sebaran Informan dalam Wawancara	73
Tabel 3.2	Sebaran Populasi Penelitian	73
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel	78
Tabel 3.4	Tingkat Manfaat/ Implikasi KPIT Terhadap Kesiagaan Militer Indonesia	84
Tabel 3.5	Teknik Analisis Hubungan antar Variabel	85
Tabel 5.1	Alokasi Anggaran Kerjasama Internasional Kemhan	153
Tabel 5.2	Jumlah Pertemuan Pejabat Kemhan RI dan Tiongkok	157
Tabel 5.3	Jenis Diklat Bidang Pertahanan yang diikuti oleh Personil Indonesia	171
Tabel 5.4	Kegiatan Rapat, Sidang, Seminar dengan Tiongkok	177
Tabel 5.5	*Defence Industry Cooperation Meeting* (DICM) Indonesia-Tiongkok	185
Tabel 5.6	Kegiatan Latihan Militer Bersama TNI-PLA	190
Tabel 6.1	Persentase dan Tingkat Implikasi Kegiatan KPIT Terhadap Kesiagaan Satuan	238
Tabel 6.2	Persentase Penerapan dan Tingkat Implikasi Kegiatan KPIT Terhadap Kesiagaan Militer	256
Tabel 6.3	Manfaat Kegiatan KPIT	258
Tabel 7.1	Bentuk Peran, Dukungan, dan Kontribusi Kondisi Lingkungan Terhadap Implementasi Kegiatan KPIT	283
Tabel 7.2	Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Kesiagaan Militer	311

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS
KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Deskripsi	Hal
Gambar 2.1	*Stages of the Policy Process*	29
Gambar 2.2	Sekuensi Implementasi Kebijakan	31
Gambar 2.3	Tindakan regulatif dan alokatif serta implementasinya melalui program atau kegiatan	32
Gambar 2.4	Tahapan Manfaat hasil Kerjasama Pertahanan	43
Gambar 2.5	Kerangka Berpikir	64
Gambar 3.1	Persentase Tingkat Kesalahan	74
Gambar 3.2	Model Analisis Interaktif Milles dan Hubberman	81
Gambar 4.1	Peta Wilayah Sengketa Kawasan Laut Tiongkok Selatan	102
Gambar 4.2	Peta *Nine Dash Line* dan Wilayah ZEE Indonesia	104
Gambar 4.3	Peta *Ten Dash Line* Tiongkok	105
Gambar 4.4	Jangkauan Persenjataan Negara Tetangga	109
Gambar 4.5	Jangkauan Persenjataan Milik Indonesia	113
Gambar 6.1	Prosentase Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu Indikator Penguasaan Teknologi Militer	200
Gambar 6.2	Prosentase Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu Indikator Strategi Kepemimpinan Militer	206
Gambar 6.3	Prosentase Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu Indikator Kapasitas Personel Militer	212
Gambar 6.4	Persentase Manfaat Kegiatan KPIT Bagi Kesiagaan Individu	219
Gambar 6.5	Peran Masing-masing Indikator dalam Peningkatan Kesiagaan Individu	219
Gambar 6.6	Persentase Penerapan Manfaat Hasil Kegiatan KPIT Indikator Penguasaan Teknologi Militer di Satuan	223
Gambar 6.7	Persentase Penerapan Manfaat Hasil Kegiatan KPIT	228

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	Indikator Strategi Kepemimpinan Militer di Satuan	
Gambar 6.8	Persentase Penerapan Manfaat Hasil Kegiatan KPIT Indikator Kapasitas Personel Militer di Satuan	232
Gambar 6.9	Persentase Manfaat Kegiatan KPIT Terhadap Kesiagaan Satuan	237
Gambar 6.10	Persentase Penerapan Hasil Kegiatan KPIT Dapat Meningkatkan Kesiagaan Militer	240

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	**Deskripsi**
Lampiran 1.	Kuesioner Tertutup
Lampiran 2.	Skor Jawaban Responden
Lampiran 3.	Frekuensi Jawaban Responden
Lampiran 4.	Persepsi Responden Tentang Manfaat Bagi Kesiagaan Individu
Lampiran 5.	Persepsi Responden tentang Manfaat Bagi Kesiagaan Satuan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR SINGKATAN

AAL	Akademi TNI Angkatan Laut
ACFTA	*ASEAN-China Free Trade Agreement*
Akabri	Akademi Angkatan Bersenjata
ALIT	*Aerospace Long March International Trade & co., Ltd.*
Alutsista	Alat Utama Sistem Senjata
ANZUS	*Australia, New Zeland, and United States*
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APSCO	*Asia-Pasific SpaceCooperation Organization*
ARF	ASEAN *Regional Forum*
AS	Amerika Serikat
ASC	ASEAN *Security Community*
ASEAN	*Asociation of South East Asia Nation*
Asintel	Asisten Intelijen
Asops	Asisten Operasi
Aspam	Asisten Pengamanan
Athan	Atase Pertahanan
BAIS	Badan Intelijen Strategi
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMD	*Ballistic Missile Defense*
BPS	Badan Pusat Statistik
BWC	*Biological Weapos Convention*
CBM	*Confidence Building Measures*
CBRN-E	*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive Threats*
CCTF	*Commander of Chinese Task Force*
CENTO	*Central Treaty Organization*
CETC	*China/Tiongkok Electronics Technology Group Corporation*
CGWIC	*China/Tiongkok Great Wall Industry Corporation*
CPI	*China/Tiongkok Power Investment Corporation*
CPLA	*China People Of Liberation Army*
CPLAAF	*Chinese People Liberation Army Air Force*
CPMIEC	*Tiongkok/China Precision Machinery Import-Export Corporation*
CWC	*Chemical Weapons Convention*
DCA	*Defense Cooperation Agreement*
DECI	*Defence Electronic Complex of Indonesia*
Dedik	Deputi Bidang Pendidikan
DICM	*Defence Industry Cooperation Meeting*
Dijen	Direktorat Jenderal
Ditkersin	Direktorat Kerja sama Internasional
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

FGD	*Focus Group Discussion*
FMS	*Foreign Military Sales*
GDP	*Gross Domestics Product*
G30S	Gerakan 30 September
HAHO	*High altitude high opening*
HAKI	Hak Kekayaan Intelektual
HALO	*High Altitude Low Opening*
HAM	Hak Asasi Manusia
IAPS-CASS	*Institute of Asia Pasific, Chinese Academy of Social Sciences*
IMET	*International Military Education and Training*
Inpres	Instruksi Presiden
ITDC	*Indonesia-Tiongkok Defence Cooperation*
JCC	*Joint Coordinating Commitee*
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	Petunjuk Teknis
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Kasau	Kepala Staf Angkatan Udara
Kasubdit	Kepala Sub Direktorat
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KCR	Kapal Cepat Rudal
Kemhan	Kementerian Pertahanan
Keppres	Keputusan Presiden
Kersin	Kerja sama Internasional
KPIT	Kerja sama Pertahanan Indonesia-Tiongkok
KRI	Kapal Republik Indonesia
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
KTP	Kartu Tanda Penduduk
Latma	Latihan Bersama
LCS	Laut China Selatan
LNG	*Liquefied Natural Gas*
LoI	*Letter of Intent*
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LTG	*Liuetnant General*
LTS	Laut Tiongkok Selatan
Mabes	Markas Besar
Mako	Markas Komando
MoE	*Method of Entry*
MoM	*Minutes of Meeting*
MOU	*Memorandum of Understanding*
NATO	*North AtlanticTreaty Organization*
NDU	*National Defence University*
Nekolim	Neo Kolonialisme dan Imperialisme
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPT	*Nuclear Proliferation Treaty*

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS
KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

OMSP	Operasi Militer Selain Perang
Paban	Perwira Pembantu
Pabandya	Perwira Pembantu Madya
Pamen	Perwira Menengah
Pasis	Perwira Siswa
Paskhas	Pasukan Khas TNI AU
PASOL	*Pacific Area Senior Officer Logistic*
Pati	Perwira Tinggi
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PBC	*Planning Briefing Conference*
Permenhan	Peraturan Menteri Pertahanan
Perpres	Peraturan Presiden
PGB	*Precision Guide Bomb*
PJD	Pertempuran Jarak Dekat
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKO	*Peace Keeping Operation*
PKT	Partai Komunis Tiongkok
PLA	People Liberation Army
PLAN'S	*People's Liberation Army Navy Ships*
PNG	Papua New Guinea
PPRA	Program Pendidikan Reguler Angkatan
PRC	*People Republic of China*
Protap	Prosedur Tetap
PRRI	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PSI	*Proliferation Security Initiative*
PT DI	PT. Dirgantara Indonesia
Renlat	Perencanaan Latihan
RGB	Rencana Garis Besar
RI	Republik Indonesia
RPJPN	Pencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
SAM	*Survace to Air Missile*
SAR	Search And Resque
SASTIND	*State Administration for Science, technology and Industry for National Defence*
Sat	Satuan
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SDM	Sumber Daya Manusia
SEATO	*South East Asia Treaty Organization*
Sekjen	Sekretaris Jenderal
Sesko AD	Sekolah Staf dan Komando TNI AD
Sesko AL	Sekolah Staf dan Komando TNI AL
Sesko AU	Sekolah Staf dan Komando TNI AU
Sesko TNI	Sekolah Staf dan Komando Gabungan TNI

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

SLOC	*Sea Lines of Communication*
SMA	Sekolah Mengeah Atas
SSLN	Studi Strategis Luar Negeri
SOP	Standard Operating Procedures
Sops	Staf Operasi
Strahan	Strategi Pertahanan
TIK	Teknologi Informasi Komunikasi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
ToT	*Transfer of Technology*
UAV	*Unmanned Aerial Vehicle*
UNCLOS	*United Nations Convention on the Law of the Sea*
UU	Undang-undang
UUD	Undang Undang Dasar
USD	United States Dollars
USPACOM	*The United States Pacific Command*
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Setiap negara melaksanakan kerja sama pertahanan dengan tingkat komitmen yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi KPIT dalam meningkatkan kesiagaan militer Indonesia. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenhan, telah melaksanakan tindakan regulatif dan alokatif. Beberapa aturan telah diterbitkan, disosialisasikan, dikendalikan dan diawasi. Penunjukan pejabat telah dilakukan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, sehingga semua kegiatan sesuai persetujuan kedua negara telah dilaksanakan. Kerja sama pertahanan dihipotesiskan bermanfaat dan berimplikasi terhadap kesiagaan militer meski dipengaruhi kondisi lingkungan.

Data primer dikumpulkan melalui survey kepada 95 orang yang pernah mengikuti kegiatan KPIT, wawancara dan diskusi kelompok terfokus terhadap pihak-pihak yang berkompeten. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan, kegiatan KPIT berimplikasi sangat kecil terhadap kesiagaan militer di Indonesia. Hal ini dikarenakan kegiatan KPIT baru digunakan sebagai sarana diplomasi pertahanan. Namun demikian, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelakunya dan berimplikasi sangat besar bagi kesiagaan individu. Penelitian ini juga menemukan bahwa kegiatan KPIT berkontribusi terhadap peningkatan kekuatan nasional Indonesia melalui kesiagaan militer. Pertukaran informasi dan industri pertahanan dapat meningkatkan kualitas organisasi, doktrin, kebijakan, kurikulum pendidikan militer, alih teknologi alutsista, termasuk kemungkinan produksi bersama. Latihan militer bersama dapat meningkatkan kemampuan anti teror, bela diri militer, pembebasan sandera, dan lainnya.

Kelemahan menonjol sehingga berimplikasi sangat kecilnya manfaat bagi satuan bisa dilihat dari empat faktor. Elite politik, baru memberikan dukungan terhadap implementasi kegiatan KPIT, tetapi belum menindaklanjutinya sampai ke aplikasi di satuan setelah pelaku kembali ke kesatuannya. Pimpinan satuan, menganggap penerapan kegiatan di satuan belum prioritas dan masih bersifat politis. Hasil yang dicapai dianggap kurang strategis, belum bisa dimanfaatkan sebagai sarana transfer teknologi, belum bisa menutup *gap* pertahanan, dan secara politik hubungan bilateral dianggap belum jelas. Minimnya alokasi anggaran bagi program pertahanan negara. Pelaku dan pelaksana, belum bisa berbuat banyak, karena merasa tidak memiliki wewenang, kurangnya koordinasi dan saling tukar ide/gagasan, tidak memonitor kelanjutan laporannya, minimnya kemauan dan kapasitas pribadi.

Kata kunci :
kebijakan kerja sama pertahanan, manfaat, implikasi, kesiagaan militer.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLIKASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK TAHUN 2007)
AGUS PURWO WICAKSONO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Armai
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

Every country establishes defence cooperation with each other with different levels of commitment. This study aims at analyzing some factors affecting the ITDC in improving Indonesia's military preparedness. As a follow up, the Indonesian government, in this case through the Ministry of Defence, has taken some regulatory and allocative measures. Some regulations have been issued, disseminated, controlled and supervised. Officials have been appointed with the support of the existing resources so that all the activities are conducted as agreed by the two countries involved. It is hypothesized that the defence cooperation will be beneficial and that it will have some implications on the military preparedness despite the influence of the environmental conditions.

The primary data were collected through a survey of 95 people who had participated in the ITDC, interviews and focus group discussions involving competent parties. Meanwhile the secondary data were obtained from various documents. The collected data were analyzed using a qualitative approach with the support of quantitative data. The outcome of the analysis demonstrates that the ITDC activities contribute very little to the Indonesian military's preparedness. The reason behind this is that the ITDC activities have merely been used as the means of defence diplomacy. However, those activities were found to be beneficial for the individuals involved and have significant implications on their preparedness. This study also found that the ITDC activities contribute to improving the Indonesia's national strength in terms of increased military preparedness. Exchange of information and defence industry will improve the quality of the organization, doctrine, policy, military course curriculum, technology transfer of the primary weaponry defence system, including the possibility of joint production. Meanwhile, joint military exercises will increase anti-terror capabilities, military self-defence, hostage rescue, and others.

The notable weaknesses that result in small contribution to the work units as a whole can be seen from four aspects. The political elites have given their supports only for the implementation of the ITDC activities, but there is no support yet given for the individuals after they return to their work units. Leaders at the work units do not consider the implementation of the activities in their work units as a priority, and that it is still just political in nature. The results achieved are considered as something less strategic which cannot be used as a means for technology transfer and to close the defence gap. Furthermore, it is considered that politically the bilateral relations are still not well-defined. There is a lack of budgetary allocations for national defence programs. The actors and the implementers cannot do much as they do not have the required authority. There are also lack of coordination and exchange of ideas, lack of monitoring of report follow-up as well as the lack of goodwill and personal capacities.

Keywords:

defence cooperation policies, benefits, implications, military preparedness.